

BERPOLITIK SEHAT DALAM PILKADA SERENTAK DI ERA SERBA DIGITAL



Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Unpas Bandung

Pendahuluan

Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilu Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung (Pemilukada/Pilkada). Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Melalui pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah.

Dengan diselenggarakannya pesta demokrasi langsung tersebut dapat di pandang sebagai adanya kelenturan atau fleksibilitas pemerintah reformasi menjawab tuntutan masyarakat tentang perlunya suatu sistem pemerintahan yang memberi peran lebih besar kepada masyarakat di Daerah, yaitu suatu sistem pemerintahan yang tidak sentralistis (Harahap, 2005: 103). Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis ber-

dasarkan Pancasila dan UUD 1945. UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" (Pasal 1 ayat (1)). Demokrasi sebagai rakyat itu sendiri, karena demokrasi adalah proses politik yang dilakukan rakyat untuk menata kehidupannya dalam sebuah masyarakat dan bangsa (Harahap, 2005: 104). Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara

pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.

Pilkada secara damai adalah alternatif untuk menyelamatkan demokrasi melalui proses-proses yang normal. Kampanye merupakan awal langkah untuk mencari pemimpin yang berbobot, memiliki integritas dan komitmen moral. Dalam konteks inilah, etika politik menjadi kesadaran politik sebagai bagian tanggung jawab menyelamatkan dengan meracik kedamaian dan kebersamaan dengan mempertebal etika dan moralitas berpolitik. Berdasarkan hal tersebut, pemilu secara serentak akan mengakibatkan proses kampanye juga serentak dilakukan oleh semua pasangan calon dan partai pendukungnya, bagaimana menciptakan politik yang sehat di era teknologi yang semakin canggih, kampanye bisa dilakukan melalui semua lini baik itu media cetak, media online, media sosial, dan media elektronik yang semakin marak.

Menciptakan Politik Sehat dalam Pemilihan Serentak di Era Serba Digital

Konsep pemilu serentak hanya berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial. Inti konsep itu adalah menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu hari H pemilihan. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan hasil pemilu yang kongruen. Maksudnya, terpilihnya pejabat eksekutif

yang mendapatkan dukungan legislatif sehingga pemerintahan stabil dan efektif. Dalam sistem pemerintahan parlementer, tidak perlu pemilu serentak, karena sekali pemilu, sudah memilih anggota legislatif sekaligus pejabat eksekutif. Sebab, partai politik atau koalisi partai politik yang menang pemilu atau menguasai mayoritas kursi parlemen, berhak menunjuk perdana menteri beserta pejabat eksekutif lainnya. Meskipun sistem pemerintahan presidensial menerapkan periode kekuasaan pasti (*fix system*), dan sistem pemerintahan parlementer sewaktu-waktu bisa bubar akibat eksekutif tidak lagi mendapat dukungan parlemen, namun sejarah menunjukkan justru sistem pemerintahan parlementer lebih stabil dan efektif daripada sistem pemerintahan presidensial. Sebabnya jelas, eksekutif mendapat dukungan legislatif. Stabilitas dan efektivitas pemerintahan pasca pemilu inilah yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu serentak. Konsep dan desain ini lahir berdasarkan pengalaman negara-negara Amerika Latin yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, tetapi justru pemerintahan tidak stabil akibat pertikaian antara presiden terpilih dengan parlemen yang mayoritas anggotanya tidak berasal dari partai presiden atau partai koalisi pendukung Presiden.

Ketegangan dan potensi konflik antarpengukung pasangan calon dalam dua pilkada serentak sangat tinggi, karena masing-masing memperebutkan satu kursi. Pasangan

calon akan melakukan apa saja demi meraih kursi tersebut, dengan memanfaatkan isu agama, etnis, kedaerahan dan uang. Memang dalam dua pilkada serentak tersebut, terdapat dua kursi yang diperebutkan (kursi gubernur dan bupati/walikota). Tetapi karena tidak terjadi koalisi pendukung pasangan calon yang sama antara pilkada gubernur dan pilkada kabupaten/kota, maka masing-masing pasangan calon dan pendukungnya cenderung mengerucut untuk berebut satu kursi. Celakanya, pada situasi seperti itu, aparat keamanan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengantisipasinya. Dalam pilkada yang berserakan waktunya, kekurangan aparat keamanan di daerah yang sedang melaksanakan pilkada, bisa dibantu dari daerah lain yang tidak melaksanakan pilkada. Sedangkan dalam dua pilkada serentak, semua aparat keamanan sepenuhnya konsentrasi di masing-masing daerah, yang secara rasio jumlahnya tidak sebanding dengan ketegangan dan potensi konflik. Pada titik inilah pengaturan dua pilkada serentak bisa menjadi blunder, menciptakan kekerasan dan kerusuhan yang lebih besar, sehingga penghematan biaya jadi tidak ada artinya. Dua pilkada serentak juga menimbulkan kebingungan pemilih yang luar biasa, sehingga bisa meningkatkan potensi kekerasan dan kerusuhan. Pemilih bingung karena koalisi partai politik pendukung pasangan calon tidak jelas. Misalnya, path pemilihan gubernur Partai A dan Partai B,

berkoalisi dengan Partai C dan Partai D untuk mengusung pacangan calon gubernur, tetapi pada pemilihan bupati/walikota Partai A berkoalisi dengan Partai C dan Partai E, sehingga pendukung Partai A dan partai-partai lainnya dibingungkan oleh pilihan politik partainya. Partai politik tidak menyadari, bahwa ini merupakan benih-benih ketidakpercayaan pendukung kepada partai politik.

Pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan sebagai upaya mendemokratisasikan kehidupan berbangsa-bernegara di tingkat lokal. Penumbuhan demokrasi tingkat lokal ini merupakan ikhtiar untuk mencari pemimpin lokal yang memiliki legitimasi kuat, demokratis dan representatif. Sebuah pengalaman berdemokrasi yang jika dilihat dari pluralitas negeri kita tampak merupakan pesta demokrasi yang sarat beban. Pelaksanaan pilkada secara langsung ternyata bukan tanpa masalah. Pemilihan Kepala Daerah yang telah diselenggarakan selama ini ternyata cukup banyak mendapat tantangan internal. Kerusuhan yang terjadi selama ini telah mencoreng hitam wajah bangsa ini di negeri yang dipuji sebagai salah satu dari tiga negara demokrasi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Akan tetapi, predikat hebat itu hilang seketika akibat berbagai masalah dan kerusuhan yang terjadi sebelum dan setelah pelaksanaan pilkada. Pemilu serentak seperti apa yang dapat memenuhi kebutuhan pemerintahan efektif dalam konteks NKRI.

Dalam pembahasan RUU Pilkada, DPR dan pemerintah mengajukan alternatif Pemilu Serentak 2019. Itu artinya pemilu serentak akan dilaksanakan dalam waktu (kurang lebih bersamaan) dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dalam hal ini ada dua kemungkinan: *pertama*, pilkada dibarengkan waktu pelaksanaannya dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden; *kedua*, pilkada serentak dilakukan setelah pemilu legislatif dan pemilu presiden, pada tahun yang sama. Jika pilihan pertama dilakukan, maka pemilih akan menghadapi problem besar dalam memberikan suara karena begitu banyak calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif yang harus dipilih.

Dalam pemilihan seperti ini, pengaruh pemilihan pejabat nasional bisa merusak pemilihan pejabat daerah, sehingga pemilih tidak bisa memilih secara tepat pejabat daerah yang dibutuhkannya. Pemilu total nasional ini juga akan menyulitkan KPU dan jajarannya karena begitu besar dan berat beban manajemen yang harus ditanggung. Bagi partai politik, pemilu total nasional juga menghadapi problem tersendiri karena mereka super sibuk untuk harus menyiapkan sekian ratus ribu calon, sehingga proses seleksi calon tidak maksimal. Sementara itu, jika pilihan kedua yang dilakukan (pemilu legislatif, pemilu presiden, lalu pilkada serentak), maka sudah pasti pemilih akan mengalami kejenuhan, sehingga angka partisipasi pemilih pada pilkada turun drastis. Dalam model penyelenggaraan seperti ini

pemilu presiden bisa mempengaruhi pilkada serentak, tetapi akan menghasilkan kebingungan pemilih, karena pasangan calon kepala daerah tidak diajukan oleh partai-partai yang mengajukan pasangan calon presiden. Di sisi lain, partai tidak didorong untuk meningkatkan kinerjanya sepanjang tahun, karena mereka baru menemui pemilih setiap lima tahun sekali menjelang pemilu. Pola kerja partai politik yang demikian tidak akan pernah mendewasakan partai sebagai kekuatan demokrasi.

Internet memungkinkan masyarakat bertukar ide, gagasan, pikiran, juga informasi sosial melalui *gadget* peserta pemilu atau konstituen bisa mengeluarkan apa yang mereka sangka, atau gagasan sekali "klik" melalui *gadgetnya*. *Gadget* identik dengan kaum muda. Kecanggihan teknologi, semakin mempercepat akses informasi di gengaman tangan dengan hanya sekali "klik", kapanpun, di manapun. Karakteristik media sosial yang spontan dan terbuka membuat kelompok masyarakat yang aktif bersuara di ruang digital lebih kritis menilai pemerintah. Kecepatan dan kedalaman berita harusnya saling berdampingan agar menghasilkan fakta akurat. Namun, dalam fenomena di media sosial, banyak *netizen* utamanya kaum muda mudah terprovokasi berita yang belum jelas faktanya. Ketika politik dan media sosial disatukan justru banyak menuai politik kebencian. Beradu argumen, lebih arif jika menyalurkannya lewat forum

diskusi. Penggunaan media massa atau media sosial lebih diberdayakan sebagai alat bantu untuk membentuk dan mendorong budaya politik yang sehat dan terbuka. Menjadi pengawasan dan media koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Konsep kegiatan politik yang baik, sehat, dan transparan guna membentuk perilaku politik di tengah masyarakat. Sehingga, masyarakat tak lagi apatis dan gagap politik. Bukan justru menghasilkan generasi permisif, menjadi golongan pencaci-maki akan kondisi yang sedang dialami tanpa menghadirkan solusi apapun (Dina, 2016).

Internet memberi kebebasan bagi siapa pun untuk membuat *website*, *email*, maupun media sosial dan menyebarkan informasi, maka cenderung tidak ada kontrol atas informasi yang disebarluaskan tersebut. Internet adalah ruang publik bagi semua warga dunia harus memupuk transparansi, toleransi, dan kesetaraan tanpa harus memberangus kebebasan berekspresi di ruang yang terbuka itu. Sesuai dengan Deklarasi HAM, semua orang memiliki hak untuk bebas berekspresi. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang bisa membedakan mana gagasan yang baik dan tidak baik. Kedewasaan masyarakat yang sehat atas penggunaan ruang publik akan berkembang jika negara memberi ruang yang cukup bagi setiap warga negara untuk mengaktualisasikan gagasan, bukan dengan membatasinya. Meleknya

kelas menengah Indonesia terhadap informasi didukung kuat oleh dekatnya posisi mereka dengan teknologi informasi dan komunikasi. Adanya perangkat komunikasi canggih dalam genggaman, kelas menengah Indonesia dapat melakukan hal-hal yang disebut memproduksi karya-karya intelektual dan kultural, dan menguasai posisi sebagai intelektual publik (Heryanto, 2008: 167).

Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi sangat penting bagi masyarakat dalam hal bersosialisasi dan berinteraksi. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan yang signifikan pada kehidupan masyarakat dalam segala peradaban dan kebudayaan masyarakat. Kecanggihan teknologi di era serba digital dengan mudah diakses siapa saja, kita dapat diakses melalui *gadget* untuk melakukan interaksi, sosialisasi dengan siapa saja yang kita kehendaki. Dalam hal ini, dapat berdampak positif atau negatif, berkaitan dengan pemilu serentak, internet bisa memudahkan bagi para calon-calon yang diusung oleh partai politik maupun melalui independen mendekatkan diri (*kampanye*), adapula yang dijadikan alat *black campaign* untuk menjatuhkan salah satu calon agar calon pemilih dapat dipengaruhi. Menciptakan politik sehat sangat penting pada era digital sekarang ini, untuk menciptakan ruang kondusif, interaksi yang hangat dan bersahabat, tidak dijadikan alat untuk *black cam-*

paign. Politik selama ini telah memberikan peran politik lokal cukup signifikan, terciptanya dinamika berpolitik sehat di daerah akan menumbuhkan suasana yang kondusif dan kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Asri Harahap. 2005. *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*. Jakarta: Pustaka
- Carl Friedrich. 2008. *Man and His Government*. New York: Mc Graw Hill

Dina Ashanta Puri. *Menjaga Politik Akal Sehat*, www.quareta.com Posting: 5 Oktober 2016.

Hadi., S.P. 2000. *Aspek Sosial Amdal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harold Lasswell, dan Abraham Kaplan. 2008. *Power and Society*. New Haven. Yale University Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Keluarga Besar
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PASUNDAN

Mengucapkan Selamat dan Sukses

KEPADA
WISUDAWAN/WISUDAWATI SARJANA DAN PASCASARJANA
GELOMBANG II 2017-2018

Dekan
ttd
Moch. Budiana, S.IP., M.Si.

Janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat (QS. al-Nisa: 105)